

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Pesatnya pertumbuhan ekonomi dan urbanisasi mengakibatkan tingginya sampah yang dihasilkan perkotaan di seluruh dunia. Komposisi sampah perkotaan berubah secara signifikan seiring dengan pola konsumsi masyarakat. Perubahan tersebut mengakibatkan masalah lingkungan. Timbulan sampah tidak dapat dihentikan tetapi harus dikelola, dikurangi atau diminimalisasi secara baik (Wang and Nie, 2001).

Pengelolaan sampah merupakan isu penting selain masalah lingkungan lainnya terutama untuk kota padat di negara berkembang. Pengelolaan sampah menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat. Untuk sampah pemukiman, pembagian tanggung jawab pengelolaan sampah dibedakan menjadi dua, pengelolaan sampah dari sumber ke TPS menjadi tanggung jawab masyarakat dan pengelolaan sampah dari TPS ke TPA menjadi tanggung jawab pemerintah daerah (Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 33 tahun 2010 Pasal 7).

Kabupaten Bantul termasuk wilayah yang cukup luas dan menghasilkan sampah dalam jumlah yang banyak. Hal itu dibuktikan dengan kabupaten Bantul terdiri dari 17 Kecamatan. Kabupaten Bantul memiliki jumlah penduduk sebanyak 968.632 jiwa dan memiliki potensi sampah 0,437 kg/orang/hari. (BLH DIY dan DLH Bantul, 2018).

Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Bantul memiliki 23 *truck* yang dapat beroperasi dalam pelayanan persampahan, namun masih sangat kecil dari segi jumlah dibandingkan dengan timbulan sampah yang dihasilkan. Keterbatasan sarana dan prasarana persampahan mengakibatkan sampah di Kabupaten Bantul tidak terangkut semua ke TPS maupun TPA. Bahkan masih banyak masyarakat yang membuang sampah dengan cara dibakar, dibuang di lahan kosong dan bantaran sungai secara ilegal. Dalam penelitian Setiadi (2014),

sebanyak 94% sampah dikelola dengan cara ditimbun atau dibakar di halaman rumah dan dibuang di sungai.

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan, pengelolaan sampah perkotaan di Kabupaten Bantul dapat dikatakan belum optimal. Terdapat berbagai faktor penyebab kurang optimalnya pengelolaan sampah tersebut seperti minimnya fasilitas sarana prasarana pengelolaan sampah serta kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan sampah. Apabila hal tersebut tetap dibiarkan, sampah di Kabupaten Bantul akan terus menumpuk sehingga menimbulkan pencemaran dan permasalahan lingkungan.

Oleh karena itu evaluasi dan perencanaan pengelolaan sampah di Kabupaten Bantul sangat diperlukan. Tujuannya untuk memperbaiki serta meningkatkan pengelolaan sampah yang ada. Pemerintah menargetkan pengurangan dan penanganan sampah sebesar 30% dan 70% dari angka timbulan sampah pada tahun 2025 (Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 Pasal 5). Perencanaan ini diharapkan dapat digunakan untuk menentukan kebijakan pengelolaan sampah di Kabupaten Bantul. Dengan demikian, masalah persampahan di Kabupaten Bantul dapat dikelola dengan baik.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat dirumuskan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana kondisi eksisting pengelolaan sampah pada aspek teknis operasional di Kabupaten Bantul?
2. Bagaimana tingkat pencapaian kinerja pengelolaan sampah pada aspek teknis operasional di Kabupaten Bantul?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Penelitian ini mempunyai tujuan, antara lain:

1. Mengetahui kondisi eksisting pengelolaan sampah pada aspek teknis operasional di Kabupaten Bantul
2. Mengetahui tingkat pencapaian kinerja pengelolaan sampah pada aspek teknis operasional di Kabupaten Bantul

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Manfaat dari penelitian ini, antara lain:

1. Memberikan informasi terkait kondisi eksisting pengelolaan sampah pada aspek teknis operasional di Kabupaten Bantul
2. Memberikan informasi terkait tingkat pencapaian kinerja pengelolaan sampah pada aspek teknis operasional di Kabupaten Bantul

### **1.5 Batasan Masalah**

Peneliti membatasi masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini, yaitu:

1. Lokasi penelitian dilakukan di Kabupaten Bantul
2. Lokasi pengambilan data dilakukan di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul, Badan Lingkungan Hidup DIY dan Dinas Satuan Kerja Penyehatan Lingkungan Permukiman Berbasis Masyarakat DIY
3. Peneliti mengidentifikasi peran masyarakat dan pemerintah dalam pengelolaan sampah perkotaan pada aspek teknik operasional di Kabupaten Bantul.